

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG HAK DANA PENSIUNAN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)**

**(Studi Kasus di Kampung Majabaru, Kelurahan Durian Payung, Kecamatan  
Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Syari'ah**



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1441 H/2020 M**

# **ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG HAK DANA PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)**

**(Studi Kasus di Kampung Majabaru, Kelurahan Durian Payung, Kecamatan  
Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung)**

## **SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Syari'ah



**Pembimbing I : Dra. Firdaweri, M.H.I**

**Pembimbing II : Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1441 H/2020 M**

## ABSTRAK

Terdapat kesenjangan dengan memperhatikan kejadian yang terjadi di Kampung Maja Baru Kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung yaitu adanya ketidakadilan atau kesenjangan dengan tuntunan Al-Qur'an yang seharusnya si isteri mendapat bagian tetapi anaknya tidak memberikan sebagaimana hak dana pensiun itu untuk ibunya. Dalam Syari'at Islam aturan *tirkah* yakni harta peninggalan mayat yakni segala sesuatu yang dimiliki sebelum meninggal baik berupa benda maupun utang atau berupa hak atas harta seperti hak usaha, hak jual beli, hak menerima ganti rugi dan hak atas harta yang timbul karena menjadi wali seseorang yang terbunuh. Rumusan Masalah dari penelitian ini yakni bagaimana praktik pembagian hak dana pensiunan PNS yang terjadi di Kampung Majabaru Kecamatan Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung? serta bagaimana analisis hukum Islam tentang hak dana Pensiunan PNS di Kampung Majabaru Kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung?. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui praktik pembagian hak dana pensiunan PNS yang terjadi di Kampung Majabaru Kecamatan Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung dan untuk mengetahui analisis hukum Islam tentang hak dana Pensiunan PNS Pada Masyarakat Kampung Majabaru Kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reaserch*). Sifat penelitian ini termasuk penelitian bersifat *deskriptif* yang menggambarkan mengenai situasi atau kejadian-kejadian, sifat sampel pada daerah tertentu dengan mencari informasi-informasi faktual, keadaan, membuat evaluasi sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai pembagian hak dana pensiun PNS di Kampung Majabaru. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: *Pertama*, praktik pembagian hak dana pensiun PNS yang terjadi di Kampung Majabaru Kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjung Karang Pusat, yaitu anak laki-laki tunggal menguasai seluruh hak dana pensiun PNS pria (ayah/pewaris) tersebut tanpa memberikan sepeser pun kepada ibunya yang seharusnya ibunya mempunyai hak atas gaji pensiun PNS tersebut. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.. *Kedua*, anak yang mengambil seluruh hak dana pensiun ayahnya sebagai PNS dapat dikatakan memakan harta secara batil atas hak ibunya. Oleh karena itu, pembagian hak dana pensiun dari Pegawai Negeri Sipil yang terjadi di Kampung Majabaru Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung, lebih banyak mengikuti aturan kebiasaan setempat dan kondisi masing-masing keluarga yang bersangkutan sehingga lebih dominan mengutamakan anak laki-laki tertua sebagai orang yang menerima harta peninggalan. Adapun mengenai anak yang mengambil seluruh hak dana pensiunan ayahnya sedangkan ibunya tidak diberikan haknya adalah tidak sesuai dengan hukum Islam.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ewi Triani  
NPM : 1521010051  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyyah)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Analisis Hukum Islam Tentang Hak Dana Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus di Kampung Majabaru, Kelurahan Durian Payung, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 13 Februari 2020

Penulis

  


Ewi Triani  
1521010051





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin, Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Tentang Hak Dana Pensiunan  
Pegawai Negeri Sipil (PNS) (Studi Kasus di Kampung  
Majabaru, Kelurahan Durian Payung, Kecamatan  
Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung)**

**Nama : Ewi Triani  
NPM : 1521010051**

**Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah)  
Fakultas : Syariah**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang  
Munaqosah Fakultas Syariah Universitas Islam  
Negeri Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Dra. Firdaweri, M.H.I.  
NIP. 195509191982032004**

**Pembimbing II**

**Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag. M.H.  
NIP. 197112041997032003**

**Mengetahui**

**Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah**

**Rohmat, S.Ag. M.H.I.  
NIP. 197409202003121003**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin, Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721) 703260

**PENGESAHAN**

**Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Tentang Hak Dana Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) (Studi Kasus di Kampung Majabaru, Kelurahan Durian Payung, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung) disusun oleh, Ewi Triani, NPM: 1521010051, program studi: Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah), telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/tanggal: 17 April 2020**

**TIM MUNAQOSYAH**

**Ketua**

**: Rohmat, S.Ag., M.H.I.**

**Sekretaris**

**: Rudi Santoso, S.H.I., M.H.**

**Penguji Utama**

**: Dr. Jayusman, M.Ag.**

**Penguji Pendamping I: Dra. Firdaweri, M.H.I.**

**Penguji Pendamping II: Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H. (...)**

**Dekan**

**Dr. H. Haidaruddin, M.H.  
190210221993031002**





## MOTTO

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ  
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٨٠﴾

*“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”. (Al-Baqarah [2] : 180).*



## PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah SWT Tuhan Yang Maha Penyayang, dengan cinta kasih Penulis persembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Bapak dan Ibu tercinta, Husni dan Suismillah, berkat doa restu dari mereka penulis dapat menempuh dan menyelesaikan pendidikan dibangku kuliah. Terimakasih kepada kalian yang sudah berjuang sekuat tenaga demi untuk pendidikan anak yang kalian sayangi.
2. Kakak-kakak tercinta, Eko Siswanto dan Eki Zuhelmi, S.T., terimakasih atas semangat, dukungan serta doa kalian kepada penulis. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat, hidayah serta rezekinya kepada kalian.
3. Adik-adik tercinta, Eril Gustami dan Elvano Desmi Penta terimakasih atas doa dan dukungan kalian kepada penulis. Semoga Allah SWT memberikan rahmat dan melimpahkan rezeki kepada kalian.
4. Seluruh keluarga besar yang selalu mendukung dan memberikan semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Saudara-saudaraku keluarga besar Hukum Keluarga Islam angkatan 2015 yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam mencapai keberhasilanku.
6. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah mendewasakanku dalam berfikir dan bertindak.



## RIWAYAT HIDUP

**Ewi Triani**, lahir pada tanggal 16 September 1997 di Teluk Betung. Anak ketiga dari pasangan Bapak Husni dan Ibu Suismillah.

1. Sekolah Dasar Negeri 2 Gotong Royong, Bandar Lampung pada tahun 2005-2009;
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri 18 Bandar Lampung pada tahun 2009-2013;
3. Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Bandar Lampung pada tahun 2013-2015;
4. Pada tahun 2015 penulis melanjutkan Pendidikan formal di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung jurusan Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhshiyah).



## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas berkat, nikmat dan karunia-Nya yang telah memberikan penjelasan serta penerangan kepada hambanya yang tidak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir pendididkan Strata Satu (S1) dalam rangka menyelesaikan skripsi guna mendapatkan gelar sarjana yang penulis beri judul **“Analisis Hukum Islam Tentang Hak Dana Pensiun PNS (Studi Kasus di Kampung Majabaru, Kelurahan Durian Payung, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung)”**. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta para keluarganya, Sahabat-sahabatnya, yang Insyaallah mendapat syafaat di hari akhir, aamiin.

Dalam menyelesaikan Skripsi penulis menyadari banyak dukungan serta bantuan dari berbagai pihak, dengan demikian tanpa mengurangi rasa hormat maka penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mohammad Mukri, M.Ag. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. KH. Khairuddin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Rohmat, S.Ag., M.H.I selaku ketua jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Ibu Dra. Firdaweri, M.H.I selaku pembimbing I yang telah dengan sabar membimbing dan mengkoreksi penulisan skripsi sehingga penulisan skripsi ini selesai.
5. Ibu Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H selaku pembimbing II yang sabar membimbing dan memberikan motivasi serta arahan dalam penyelesaian skripsi ini.



6. Kepada segenap keluarga sivitas akademika, dosen, dan pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
7. Bapak dan Ibu Staf Pegawai Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung dengan penuh kesabaran dan izinnya untuk proses peminjaman buku demi terselesainya skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat terbaikku Ummi Kalsum,Amd., Rizky Akbari, S.T dan Kartika Andharista, S.H terimakasih banyak sudah menjadi sahabat-sahabat terbaikku dan selalu penjadi penyemangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Angkatan 2015, yang selalu mendorong dan memberi semangat dalam mengerjakan skripsi dari awal hingga akhir sampai terselesainya skripsi, Hervianis, Ria Rhistiani, Irfida Rahmatika, Kusallana, Peri Purnomo Sidik, M.Ridho, Rousan Fikri dan teman-teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan. Sahabat-sahabat KKN ucapan terimakasihku kepada terkhususnya Kartika Andharista, Asni karmita, Tati Toharotun Nupus, Tiara, Firman Hadi, Ekid Rohadi dan teman-teman lainnya yang tidak bisa saya sebut yang telah menemani selama KKN.
10. Partner setiaku Jemmy Aditya Firdaus, terimakasih banyak sudah menemani dan memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, hal itu tidak lain karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan waktu yang dimiliki. Akhirnya dengan keyakinan niat tulus ikhlas dan kerendahan hati semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti berikutnya untuk pertimbangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu syariah.

Bandar Lampung, 13 Februari 2020

**Ewi Triani**  
1521010051

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	3
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Fokus Penelitian.....	7
E. Rumusan Masalah .....	7
F. Tujuan Penelitian .....	7
G. Signifikasi Penelitian .....	8
H. Metode Penelitian.....	8

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Tirkah Dalam Hukum Islam.....	14
1. Pengertian Tirkah .....	14
2. Kewajiban Ahli Waris Atas Tirkah .....	15
B. Pensiun Pegawai Negeri Sipil .....	21
1. Pengertian Pensiun .....	21
2. Dasar Hukum Pensiun .....	24
3. Syarat Pensiun .....	25
4. Yang Berhak Menerima Pensiun.....	28
5. Berakhirnya Pensiun.....	29
6. Pembatalan dan Hapusnya Pensiun .....	40
C. Tinjauan Pustaka .....	41

### **BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Kampung Majabaru Kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung .....	44
1. Sejarah, Lokasi dan Struktur Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kelurahan Durian Payung.....	44
2. Kondisi Umum Kampung Majabaru Kelurahan Durian Payung	48
B. Praktik Pembagian Hak Dana Pensiun PNS di Kampung Majabaru Kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung.....	51



C. Praktik Pembagian Hak Dana Pensiun PNS Bagi Istri Berdasarkan Hasil Wawancara.....	53
---	----

#### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Praktik Pembagian Hak Dana Pensiun PNS Yang Terjadi di Kampung Majabaru Kecamatan Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung .....	58
B. Analisis Hukum Islam Tentang Hak Dana Pensiun PNS di Kampung Majabaru Kecamatan Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung .....	61

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	65
B. Rekomendasi .....	66

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

Lampiran 1 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum
Lampiran 2 Pedoman Wawancara dan Kuesioner
Lampiran 3 Dokumentasi Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung
Lampiran 4 Hasil Turnitin
Lampiran 5 Konsultasi Skripsi



## DAFTAR TABEL

1. Teknis dan Tertib Pelunasan Utang Menurut Imam Mazhab.....	24
2. Luas Wilayah, Jumlah LK dan RT Wilayah Kecamatan Tanjung Karang Pusat Pada Tahun 2019.....	45
3. Jumlah Penduduk Tiap Kelurahan di Kecamatan Tanjung Karang Pusat Menurut Jenis Kelamin.....	46
4. Kondisi Sosial Kelurahan Durian Payung.....	47





## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Penegasan Judul**

Judul adalah gambaran dalam suatu karya, baik karya ilmiah maupun karya-karya tulis lainnya. Tujuannya adalah untuk mempertegas pokok bahasan, maka diperlukan penjelasan judul dengan makna atau definisi yang terkandung di dalamnya, dengan jelas judul proposal skripsi ini adalah **“ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG HAK DANA PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi Kasus di Kampung Majabaru Kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung)”**. Dengan judul tersebut maka istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

#### **1. Analisis**

Analisis secara terminologi adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.<sup>1</sup>

#### **2. Hukum Islam**

Hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasar wahyu Allah Swt dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku *mukallaf* yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk agama Islam.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa*, Edisi Ke-empat, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 59.

<sup>2</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 1998), h. 8.

Yang dimaksud analisis hukum Islam adalah penulis akan melakukan kajian yang mendalam atau penyelidikan terhadap suatu peristiwa berdasarkan hukum Islam.

### 3. Hak Dana Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Hak pekerja sebagai PNS berupa penghasilan yang diperoleh setelah bekerja selama sekian tahun dan memasuki usia pensiun. Jika PNS bersangkutan meninggal dunia, maka dana pensiun akan diserahkan kepada pihak keluarga inti.<sup>3</sup>

### 4. Studi Kasus di Kampung Majabaru Kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung. Kampung Majabaru merupakan salah satu kampung di Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung.

Berdasarkan judul di atas dapat dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan judul keseluruhan, yaitu kajian yang mendalam tentang orang yang telah mewarisi gaji pensiun PNS dengan cara memiliki kasus yang terjadi. Berdasarkan hukum Islam mengenai hak dana pensiunan PNS dari studi kasus di Kampung Majabaru Kecamatan Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung.

---

<sup>3</sup> Pasal 14 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

## B. Alasan Memilih Judul

Alasan memilih judul dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

### 1. Alasan objektif

- a. Terdapat kejadian mengenai pembagian hak dana pensiunan PNS yang sangat dipengaruhi oleh kebiasaan dalam keluarga masing-masing tepatnya di Kampung Majabaru Kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung. Sehingga pembagian hak dana pensiunan PNS dalam setiap keluarga dapat berbeda-beda tergantung pada kebiasaan pembagian hak dalam keluarga tersebut.
- b. Berdasarkan hukum Islam telah dijelaskan di dalam ilmu *faraidh* bahwa gaji pensiunan termasuk *tirkah* yang berhak diterima oleh anggota keluarganya secara adil. Terdapat permasalahan di dalam pembagian hak dana pensiunan yang akan menimbulkan masalah dalam pembagiannya.
- c. Adapun di lapangan terdapat kasus mengenai pembagian harta *tirkah* dalam hal ini gaji pensiunan, ada seorang PNS meninggal dunia, maka meninggalkan gaji pensiun yang mana gaji pensiunan tersebut menjadi harta *tirkah* atau harta peninggalan yang seharusnya dapat diterima oleh para anggota keluarganya, tetapi kenyataan di kampung Majabaru, gaji pensiunan tersebut tidak dibagi secara adil akan tetapi gaji pensiunan tersebut hanya digunakan oleh salah satu anggota keluarga saja.

### 2. Alasan Subjektif

- a. Judul tersebut belum ada yang membahasnya dan sesuai dengan ketentuan fakultas syari'ah khususnya dalam bidang hukum keluarga.



- b. Adanya suatu kemudahan untuk memperoleh data, sesuai dengan keahlian yang dimiliki, dana yang memadai dan waktu yang tersedia.
- c. Penelitian ini dilakukan sebagai syarat akademik untuk menyusun skripsi dan juga dalam upaya menambah pengetahuan mengenai analisis hukum Islam tentang hak dana pensiunan PNS.

### C. Latar Belakang Masalah

Di Kampung Maja Baru Kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung terdapat kasus seorang pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah meninggal dunia, yang meninggalkan ahli warisnya satu orang istri dan satu orang anak laki-laki hasil dari perkawinannya dengan istri tersebut. Anak laki-laki tersebut berusia 20 tahun dan sedang menempuh pendidikan di STKIP PGRI Bandar Lampung. Uang pensiunan yang seharusnya diberikan kepada istri (ibu) diambil semua oleh anak laki-laki tersebut tanpa membaginya dengan ibunya.

Terdapat kesenjangan dengan memperhatikan kejadian yang terjadi di Kampung Maja Baru Kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung yaitu adanya ketidakadilan atau kesenjangan dengan tuntunan Al-Qur'an yang seharusnya si isteri mendapat bagian tetapi anaknya tidak memberikan sebagian harta pensiun itu untuk ibunya.

Dalam Syari'at Islam menetapkan aturan mengenai *tirkah* dengan sangat teratur dan adil. Di dalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang legal. Syari'at

Islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya dari seluruh kerabat dan nasabnya, tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan, besar atau kecil.<sup>4</sup>

Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam (QS. An-Nisa (4) : 7):

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

*“Bagi orang laki-laki ada hak dan bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.*<sup>5</sup>

Namun dalam hal ini, harta peninggalan berupa gaji pensiun tersebut telah diambil semua oleh anak laki-laki tersebut tanpa membaginya kepada ibunya. Hal ini, tidak sesuai dengan UU No. 11 Tahun 1969 pasal 16 ayat 1 yakni “apabila Pegawai Negeri atau penerima pensiun pegawai meninggal dunia, maka isteri pegawai Negeri pria yang sebelumnya telah terdaftar pada kantor Urusan Pegawai, berhak menerima pensiun duda”.<sup>6</sup> Dari uraian tersebut menjelaskan, bahwa yang paling berhak menerima uang pensiun tersebut adalah istri. Sedangkan untuk anak sendiri bisa mendapatkan uang pensiun ayahnya sepenuhnya ketika sang ibu tersebut juga telah meninggal dunia. Pada UU No.11 Tahun 1969 pasal 18 ayat 1 yang berbunyi “Apabila Pegawai Negeri atau penerima pensiun pegawai meninggal dunia, sedangkan ia tidak

<sup>4</sup>Muhammad Ali ash-Shabumi, *Ilmu Hukum Waris Menurut Islam* (Jakarta: Gema Insani press, 1995), h. 32.

<sup>5</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Mubin (Al-Qur'an dan Terjemahnya)*, (Jakarta: Pustaka Al-Mubin, 2013), h. 77.

<sup>6</sup>Undang-undang No. 11 Tahun 1969 *tentang Pensiun Janda/Duda*, Pasal 16 ayat (1)

mempunyai isteri lagi yang berhak untuk menerima pensiun duda atau bagian pensiun janda maka uang pensiun tersebut diberikan kepada anaknya”.<sup>7</sup>

Dalam ketentuan di atas juga hak istri lebih utama dibandingkan dengan hak anak sebagai penerima *tirkah* uang pensiun. Padahal sudah dijelaskan di atas, bahwa dalam ketentuan hukum *tirkah*, istri dan anak sudah mendapatkan bagian masing-masing. Maka istri tersebut berhak meminta haknya dari uang pensiun tersebut.

Berdasarkan keterangan di atas, sangat menarik untuk membahasnya lebih lanjut sebagaimana sesungguhnya persoalan tersebut. Penelitian ini hanya dikhususkan terhadap hak penerima uang pensiun menurut UU No. 11 Tahun 1969 yang kemudian dianalisis menurut hukum Islam. Selanjutnya akan disajikan dalam bentuk skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Tentang Hak Dana Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) (Studi Kasus Di Kampung Majabaru Kelurahan Durian Payung, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung).

#### **D. Fokus Penelitian**

Dalam penyusunan skripsi ini fokus penelitiannya adalah kasus pada masyarakat kampung Majabaru, Kelurahan Durian Payung, Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung mengenai pembagian hak dana pensiunan PNS yang sangat berkaitan dengan penelitian dalam skripsi ini.

---

<sup>7</sup>Undang-Undang No. 11 Tahun 1969 tentang *Pensiun Janda/Duda*, Pasal 18 ayat (1)



### **E. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah di atas, maka peneliti dapat merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pembagian hak dana Pensiunan PNS yang terjadi di Kampung Majabaru Kecamatan Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung?
2. Bagaimana analisis hukum Islam tentang hak dana Pensiunan PNS di Kampung Majabaru Kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung?

### **F. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui praktik pembagian hak dana pensiunan PNS yang terjadi di Kampung Majabaru Kecamatan Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam tentang hak dana Pensiunan PNS Pada Masyarakat Kampung Majabaru Kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung.

### **G. Signifikasi Penelitian**

Kegunaan Penelitian yaitu untuk mengemukakan pernyataan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki nilai guna, baik kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis.

1. Secara teoritis di harapkan penelitian ini adalah untuk mengembangkan khazanah keilmuan, khususnya dalam bidang ilmu kewarisan.

2. Secara praktis, guna melengkapi tugas-tugas kuliah guna mendapatkan gelar sarjana hukum dalam ilmu syari'ah.

## H. Metode Penelitian

Dalam rangka penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode untuk memudahkan dalam pengumpulan, pembahasan dan analisa data. Adapun dalam penulisan ini metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis dan sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah menggunakan penelitian lapangan (*field reseach*), yaitu yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Pada hakikatnya penelitian ini merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realita tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat di tengah-tengah kehidupan masyarakat.<sup>8</sup> Bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan.<sup>9</sup> Dalam hal ini data maupun informasi bersumber dari anggota masyarakat kampung Majabaru Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung, guna memperoleh data yang berhubungan dengan Analisis Hukum Islam tentang Hak Dana Pensiun PNS dengan studi kasus di Kampung Majabaru Kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung.

---

<sup>8</sup>Mardalis, *Metode Penelitian suatu pendekatan Proposal* (Jakarta: PT Bumi Aksa, 2008), h. 28.

<sup>9</sup>Ahmad Anwar, *Prinsip-Prinsip Metodologi Research* (Yogyakarta: Sumbangsi, 1975), h. 2.

## b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif* yang menggambarkan mengenai situasi atau kejadian-kejadian, sifat sampel pada daerah tertentu dengan mencari informasi-informasi faktual, keadaan, membuat evaluasi sehingga diperoleh gambaran yang jelas.<sup>10</sup> Dalam penelitian kualitatif akan terjadi tiga kemungkinan terhadap “masalah” yang dibawa oleh peneliti dalam penelitian, yang pertama adalah masalah yang dibawa oleh peneliti tetap, yang kedua “masalah” yang dibawa peneliti setelah memasuki penelitian berkembang yaitu memperluas atau memperdalam masalah yang telah disiapkan, yang ketiga “masalah” yang dibawa peneliti setelah memasuki lapangan berubah total sehingga harus diganti masalah.<sup>11</sup>

Sifat penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, secara terminologis penelitian kualitatif menurut Bagdam dan Taylor merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diminati.<sup>12</sup> Dalam penelitian yang dilakukan, penyusun mengumpulkan data melalui anggota masyarakat kampung Majabaru Kelurahan Durian Payung Kecamatan tanjung Karang Pusat Bandar Lampung untuk mendapatkan informasi mengenai Hak Dana Pensiunan PNS.

<sup>10</sup> Marzuki, *Metodologi riset Panduan Penelitian Bidang Bisnis dan Sosial* (Yogyakarta: Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2005), h.17.

<sup>11</sup> Sugyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: IKAPI, 2012), Cetakan ke-15, h. 283-284.

<sup>12</sup> Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kulitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), h. 4



## 2. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data yang tidak berbentuk angka.<sup>13</sup> Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya data yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak.<sup>14</sup> Sesuai dengan jenis data yang digunakan penelitian ini, maka yang menjadi sumber data adalah:

### a. Data Primer

Bahan-bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum. Dalam penelitian ini data yang dipergunakan adalah hasil wawancara dengan masyarakat kampung Majabaru, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang menjadi pendukung sumber data primer, yaitu berupa Al Quran, buku-buku referensi, karya ilmiah, jurnal, laporan penelitian yang berhubungan dengan topik penelitian.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data dari sumber data, maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

---

<sup>13</sup>J. Supranto, *Metode Riset Aplikasinya dalam pemasaran* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), h. 20

<sup>14</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan....*, h. 15

#### a. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan.<sup>15</sup> Wawancara dilakukan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, wawancara dapat digunakan dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun menggunakan telepon.<sup>16</sup> Tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara yang terarah dengan menggunakan daftar pertanyaan yang mana dimaksud untuk mendapatkan data yang akurat dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang akan diteliti. Untuk mendapatkan data, penyusun melakukan wawancara dengan anggota masyarakat Kampung Majabaru Kelurahan Durian Payung, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung.

#### b. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah sebuah metode yang akurat dan spesifik dalam melakukan pengumpulan data serta memiliki tujuan untuk mencari informasi mengenai segala kegiatan yang sedang berlangsung untuk dijadikan objek kajian dalam sebuah penelitian.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental

<sup>15</sup>Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT.Rineke Cipta, 2013), h. 95.

<sup>16</sup>*Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D....*, h.194.

dai seseorang.<sup>17</sup> Metode ini digunakan untuk menghimpun atau memperoleh data, pelaksanaan metode ini dengan mengadakan pencatatan baik berupa arsip-arsip atau dokumentasi maupun keterangan yang berhubungan dengan gambaran umum penelitian yaitu pada Masyarakat Kampung Majabaru Kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung.

#### 4. Teknik Pengolaan Data

Setelah keseluruhan data terkumpul maka tahap selanjutnya dengan cara:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) adalah mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai, atau relevan dengan masalah.
- b. Penandaan data (*coding*) adalah pemeriksaan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku literatur, peraturan dalam ilmu hukum atau dokumen), pemegang hak cipta (nama penulis, tahun penerbitan), atau urutan rumusan masalah (masalah yang pertama A masalah yang kedua B), dan seterusnya.
- c. Rekontruksi data (*recontrucing*) yaitu menyusun ulan data secara teratur, logis sehingga mudah difahami dan diinterpretasikan.

#### 5. Teknik Analisa Data

Setelah data yang dikumpulkan selesaidi edit, di *code* dan telah di ikhtisarkan, maka langkah selanjutnya adalah analisis terhadap hasil-hasil

---

<sup>17</sup>*Ibid*, h. 329



yang telah diperoleh.<sup>18</sup> Metode analisa data yang dilakukan secara kualitatif, dalam metode ini berfikir induktif, yaitu berfikir dengan berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang konkrit yang khusus itu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum. Dengan metode ini penulis dapat menyaring atau menimbang data yang telah terkumpul sehingga didapatkan jawaban yang benar dari permasalahan. Pada analisa data penulis akan mengolah data yang dari hasil studi kepustakaan dan lapangan. Data tersebut akan penulis olah dengan baik dan untuk selanjutnya diadakan pembahasan terhadap masalah-masalah yang berkaitan.



---

<sup>18</sup>Kholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Peneitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 156.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Tirkah Dalam Hukum Islam

#### 1. Pengertian Tirkah

Lafadz *at-tarikah* atau *at-tirkah* ialah *masdar* bermakna *maf'ul* (objek) yang berarti *matrukah* (sesuatu yang ditinggalkan). Tirkah menurut bahasa yaitu sesuatu yang ditinggalkan atau disisakan oleh seseorang. Sedangkan menurut istilah, *tirkah* adalah seluruh yang ditinggalkan mayit berupa harta dan hak-hak yang tetap secara mutlak. *Tirkah* mencakup:

- a. Kebendaan berupa benda-benda bergerak dan benda-benda tetap.
- b. Hak-hak yang mempunyai nilai kebendaan, seperti hak monopoli untuk memberdayakan dan menarik hasil dari suatu jalan, sumber air minum, dan juga termasuk hak kemanfaatan seperti memanfaatkan barang yang disewa dan dipinjam. Hak yang bukan kebendaan, seperti hak *syuf'ah* (hak beli yang diutamakan untuk salah seorang anggota serikat atau tetangga atas tanah, pekarangan dan lain-lain yang dijual oleh anggota serikat yang lain atau tetangganya) serta hak *khiyar* seperti *khiyar syarat*.
- c. Sesuatu yang dilakukan oleh mayit sebelum meninggal dunia, seperti *khamar* yang telah menjadi cuka setelah ia wafat dan jerat yang menghasilkan binatang buruan setelah meninggal dunia. Keduanya dapat diwariskan kepada ahli waris mayit.

d. Diyat (denda) yang dibayarkan oleh pembunuh yang melakukan pembunuhan karena khilaf. Hal ini sesuai dengan pendapat yang lebih kuat, memasukkan diyat ke dalam kepemilikan mayit sebelum matinya.<sup>19</sup>

Maka apa saja yang ditinggalkan seseorang sesudah matinya oleh jumhur fuqaha diistilahkan dengan *tirkah* (harta peninggalan) baik mayat punya utang atau tidak, baik utangnya itu berupa utang *'ainiyah* atau *syakhshiyyah*.<sup>20</sup>

## 2. Kewajiban Ahli Waris Atas Tirkah

Dalam ketentuan umum Pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Dalam terminologi fiqh, harta peninggalan disebut dengan *tirkah*. Agar harta peninggalan tersebut dapat dibagi sebagai warisan, maka perlu diselesaikan kewajiban-kewajiban tertentu.

Harta peninggalan (*tirkah*) ini masih belum dapat dipastikan untuk menjadi harta warisan yang akan dibagi-bagi terhadap ahli warisnya. Karena bisa jadi harta peninggalan tersebut ternyata hanya cukup untuk membayarkan atau mengeluarkan segala hak yang masih berkaitan dengan *tirkah* seperti biaya penyelenggaraan jenazah, utang, dan wasiat. Sehingga harta warisan itu dimaksudkan dengan harta peninggalan yang sudah dalam keadaan bersih.

<sup>19</sup> Addys Aldizar, *Hukum Waris* (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004), h. 67-68.

<sup>20</sup> Muhammad Ali Ash Shabuny, *Hukum Waris Islam* (Surabaya: Al Ikhlas, 1995), h. 49.

Kewajiban-kewajiban yang dimaksud yaitu:

a. Biaya Keperluan Sakit dan Perawatan Jenazah

Biaya perawatan pengobatan ketika si pewaris sakit menjadi beban dari harta peninggalan pewaris. Demikian juga biaya perawatan jenazah, mulai dari memandikan, mengafani, mengusung dan menguburkan jenazah. Besar biaya tersebut diselesaikan secara wajar dan *makruf* (kepatutan). Tidak boleh terlalu kurang dan juga tidak boleh berlebihan.

Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa kewajiban menanggung biaya perawatan tersebut terbatas pada keluarga yang semasa hidupnya ditanggung oleh si mati, maka sangat wajar apabila mereka yang diberi tanggung jawab jika harta peninggalan si mati tidak mencukupinya.<sup>21</sup>

Apabila keluarga si mati juga tidak mampu maka biaya perawatan jenazah diambilkan dari Baitul Mal atau dalam bahasa Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebut dengan istilah Balai Harta Keagamaan.<sup>22</sup> Dalam konteks Indonesia, definisi Balai Harta Keagamaan memang belum jelas benar, apakah seperti dana sosial yang dibentuk pada setiap RT, RW, atau Kelurahan/Desa, ataukah dibentuk lembaga formal oleh pemerintah.

Imam Malik mempunyai pendapat apabila si mati tidak memiliki harta peninggalan, maka biaya perawatan jenazah langsung dibebankan kepada Baitul Mal atau Balai Harta Keagamaan, tidak menjadi tanggung

---

<sup>21</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 389.

<sup>22</sup> Buku II Hukum Kewarisan, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 171 huruf i.



jawab keluarga. Pendapat ini memiliki kelemahan, keluarga menjadi tidak bertanggung jawab.

Pendapat mayoritas ulama patut dipedomani, karena keluargalah yang sebaiknya bertanggung jawab menyelesaikan biaya perawatan jenazah pewaris baik dalam keadaan meninggalkan harta ataupun tidak. Karena keluarga juga yang akan menerima bagian warisan jika pewarisnya meninggalkan harta, maka sudah sepantasnya keluarga yang ikut bertanggung jawab mengurus segala sesuatunya yang berhubungan dengan penyelenggaraan jenazah (*tajhizul mayit*).

#### b. Pelunasan Utang

Hak kedua yang berkaitan dengan tirkah adalah membayar utang-utang yang masih dalam tuntutan kreditur (pemberi pinjaman) kepada orang yang meninggal. Setelah biaya *pentajhizan mayit* ditunaikan maka kelebihan harta peninggalan digunakan untuk melunasi utang *muwarrits* (pewaris).<sup>23</sup> Sebagaimana firman Allah dalam potongan surat an-nisa' ayat 11:

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴿١١﴾

“...Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya”....<sup>24</sup>

Utang merupakan tanggung jawab yang harus dibayar oleh orang yang berhutang sesuai dengan waktu yang ditentukan. Apabila orang yang berutang meninggal dunia, maka pada prinsipnya tanggung jawab

31. <sup>23</sup> Hasniah Hasan, *Hukum Warisan Dalam Islam* (Surabaya: Gramedia Press, 2004), h.

<sup>24</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Mubin (Al-Qur'an dan ....*, h. 78.

membayarnya beralih kepada keluarganya. Perkembangan sistem ekonomi yang semakin maju, dalam jenis utang tertentu misalnya kredit kepada bank, biasanya diasuransikan. Untuk jenis ini, maka tanggung jawab si kreditur diambil alih oleh asuransi setelah orang yang berutang melunasi premi asuransi dari uang pinjaman tersebut dalam jumlah yang ditentukan dalam perjanjian. Terlepas dari status hukum utang bank dan asuransi, utang semacam ini diluar tanggungan keluarga.<sup>25</sup> Hal ini sama dengan pendapat fuqaha Hanafiyah bahwa apabila orang yang berutang meninggal dunia, maka bebaslah ia dari tanggung jawabnya.

Akan tetapi jika utang tersebut antar individu, maka utang tersebut menjadi tanggung jawab keluarga (ahli waris) yang ditinggalkannya. Karena itu Islam menganjurkan agar transaksi utang-piutang dicatat secara tertib. Dimaksudkan agar tidak terjadi sengketa antara mereka yang terlibat dalam transaksi tersebut. Menunda-nunda pembayaran utang bagi yang mampu atau orang yang meninggal mempunyai harta peninggalan adalah perbuatan aniaya (dzalim).

Utang adalah salah satu hal yang harus diselesaikan sebelum harta warisan dibagi. Pelunasan utang pewaris yaitu utang-utang yang dituntut oleh seseorang dan utang-utangnya yang menjadi tanggung jawab si mayit yang meninggalkan warisan adalah menjadi kewajiban bagi ahli waris untuk menyelesaikannya. *Tirkah* tidak boleh dibagi oleh ahli waris sebelum utang-utang mayit itu dibayar.

---

<sup>25</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di....*, h. 390.

Sabda Nabi saw:

نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ

“Jiwa (roh) orang yang beriman itu bergantung pada utang nya, sehingga utangnya dibayarkan”. (HR. Ahmad).<sup>26</sup>

Para ulama membedakan antar utang kepada Allah dengan utang kepada sesama manusia. Ulama Syafi’iyah dan Ibn Hazm mendahulukan utang kepada Allah (*dain Allah*) daripada utang kepada sesama manusia (*dain al-‘ibad*). Ulama Hanafiyah dan Malikiyah mendahulukan utang kepada sesama manusia sebelum perawatan jenazah. Sedangkan ulama Hanabilah menyatakan bahwa keduanya harus dilunasi bersama-sama. Misalnya seseorang meninggal telah merencanakan ibadah haji karena ia telah mampu, tidak terlaksana karena merasa belum pantas karena usianya masih muda, tiba-tiba belum sampai ia melaksanakannya kematian telah merenggutnya.

Menurut ulama Syafi’iyah dan Ibn Hazm harta peninggalannya diambil terlebih dahulu sebesar ongkos naik haji untuk membiayai seseorang untuk menghajikan yang meninggal tersebut. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah utang haji tersebut gugur. Alasannya karena utang kepada Allah tersebut merupakan ibadah, sedangkan kewajiban ibadah gugur sebab terjadinya kematian. Selain itu, melakukan ibadah tentunya harus dengan niat dan usaha, sedangkan orang yang sudah meninggal tidak bisa melakukannya. Adapun mengenai persoalan tidak

<sup>26</sup>Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hambal* (Kairo: Muassasah Qurtubah, 1978), h. 440.

terbayarnya utang pewaris, maka yang demikian itu akan menjadi dosa dari orang yang meninggal dunia tersebut karena belum memenuhi kewajibannya pada masa hidupnya.<sup>27</sup>

Jumhur ulama berpendapat bahwa utang tersebut wajib dibayar dan diambilkan dari *tirkah*. Maksudnya wajib diselesaikan sebelum *tirkah* dilaksanakan pembagian. Teknis dan tertib pelunasan utang ini menurut imam mazhab dapat diilustrasikan sebagaimana tabel di bawah ini:

**Tabel 1**  
**Teknis dan Tertib Pelunasan Utang Menurut Imam Mazhab**

Mazhab/Imam	Jenis Utang	Keterangan
Hanafiyah	1. <i>Dain 'ainiyah</i> didahulukan daripada <i>Tajhiz al janazah</i> 2. <i>Dain Shihah</i> 3. <i>Dain maradh</i> 4. <i>Dain Allah</i> bersifat <i>tabarru</i>	<i>Dain Allah</i> gugur dengan kematian.
Malikiyah	1. <i>Dain 'ainiyah</i> didahulukan daripada <i>Tajhiz al janazah</i> 2. <i>Dain shihah/dain maradh</i> 3. <i>Dain Allah</i> yang ada saksinya (pembuktian)	
Hanabilah	1. Sama-sama dilunasi <i>dain Allah</i> dan <i>dain al 'ibad</i> 2. <i>Dain 'ainiyah</i> 3. <i>Dain mutlaqah</i>	
Syafi'iyah dan Ibn Hazm	1. <i>Dain Allah</i> 2. <i>Dain 'ainiyah</i> 3. <i>Dain shihah</i> 4. <i>Dain maradh</i>	

Sumber: Buku Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*.

<sup>27</sup>Zaini Dahlan, *Hukum Waris Menurut Al-Qur'an dan Hadits* (Bandung: Trigenda Karya, 1995), h. 41.



c. Wasiat

Memenuhi wasiat yang batasan maksimalnya sepertiga, yang diberikan kepada selain ahli waris, hal ini dilakukan sesudah membayar biaya-biaya penyelenggaraan jenazah dan sesudah dibayarnya utang-utang pewaris. Adapun jika wasiat itu jumlahnya melebihi dari sepertiga harta, maka ia tidak dapat dilaksanakan kecuali atas izin dan kerelaan dari ahli waris.<sup>28</sup>

## B. Pensiun Pegawai Negeri Sipil

### 1. Pengertian Pensiun

Pensiun adalah jaminan hari tua dan sebagai balas jasa terhadap pegawai negeri yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya terhadap negara. Pada pokoknya telah menjadi kewajiban dari setiap pegawai negeri untuk berusaha menjamin hari tuanya dan untuk itu setiap pegawai negeri wajib menjadi peserta dari suatu badan asuransi sosial yang dibentuk oleh pemerintah. Pensiun bukan saja sebagai jaminan hari tua tetapi juga sebagai balas jasa, maka pemerintah memberikan sumbangan kepada pegawainya. Pensiun diatur dalam Undang-Undang No. 43 Tahun 1999, Undang-Undang No. 11 Tahun 1969 sedangkan dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara No. 5 Tahun 2014 diatur dalam pasal 87, pasal 91 ayat 2, pasal 91 ayat 3, pasal 91 ayat 4, pasal 91 ayat 5, dan pasal 91 ayat 6. Pasal 91 ayat 2 yang menyebutkan;

Pegawai negeri sipil diberikan jaminan pensiun apabila:

---

<sup>28</sup>Samhuji Yahya, *Hukum Waris dalam Syariat Islam Disertai Contoh-Contoh Pembagian Harta Pusaka* (Bandung: CV. Diponegoro, 1992), h. 44.

- a. Meninggal dunia.
- b. Atas permintaan sendiri
- c. Mencapai batas usia pensiun
- d. Perampungan organisasi

Pasal 91 ayat (3) yang menyebutkan bahwa pensiun pegawai negeri dan jaminan hari tua pegawai negeri sipil diberikan sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua, sebagai hak dan sebagai penghargaan atas pengabdian pegawai negeri sipil.

Pasal 91 ayat (4) yang menyebutkan jaminan pensiun dan jaminan hari tua pegawai negeri sipil sebagaimana tersebut di atas mencakup jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional.

Pasal 91 ayat (5) yang menyebutkan sumber pembiayaan jaminan pensiun dan jaminan hari tua pegawai negeri sipil berasal dari pemerintah selaku pemberi kerja dan iuran pegawai negeri sipil yang bersangkutan.

Pasal 91 ayat (6) yang menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan program jaminan pensiun dan jaminan hari tua pegawai negeri sipil di atur dalam Peraturan Pemerintah.

Dalam Pasal (23) ayat (1) UU No.43 Tahun 1999 disebutkan bahwa PNS diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia.<sup>29</sup>

PNS yang diberhentikan dengan hormat menerima hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku antara lain

---

<sup>29</sup>Charles Jakson, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, Justice Publisher, (Bandar Lampung, 2014), h. 34-35.

hak pensiun dan tabungan hari tua. Menurut Undang-Undang No.11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, pensiun diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa PNS selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintah. Pengaturan lebih lanjut mengenai pensiun bagi PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2003 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Duda.

Dasar pensiun yang dipakai untuk menentukan besarnya pensiun adalah gaji pokok terakhir sebulan yang berhak diterima oleh pegawai yang berkepentingan berdasarkan peraturan gaji yang berlaku baginya. Menjelang memasuki masa pensiun biasanya ada diklat purna tugas yang dapat bermanfaat untuk mengisi masa pensiunnya, seperti mengajar dan menjadi konsultan dan sebagainya, atau ada beberapa pejabat setelah pensiun kemudian menjadi pengajar widyaiswara yang justru adalah para pensiunan pejabat.

Dalam Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 disebutkan bahwa untuk menyelenggarakan program pensiun pemerintah menanggung subsidi dan iuran. Kebijakan tentang pemberian pensiun yang diatur dalam Undang-Undang No.43 Tahun 1999 merupakan kewenangan Pemerintah, karena hal ini terkait dengan tanggung jawab Pemerintah dalam penyetaraan kesejahteraan pegawai secara nasional dan adanya jaminan bagi

setiap PNS akan masa depannya yang akan diperolehnya terkait dengan tugas dan tanggung jawab yang telah dilaksanakannya.<sup>30</sup>

## 2. Dasar Hukum Pensiun

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai.
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2011.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik.
- f. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Nomor 04/SE/1980 tanggal 11 Februari 1980 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- g. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 02/SE/1987 tanggal 8 Januari 1987 tentang Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil;

---

<sup>30</sup>Gitosudarmo Indriy, *Prinsip Dasar Manajemen Kepegawaian*, BPFE, (Yogyakarta, 1982), h. 56-57.



- h. Surat Edaran Menteri Pendayaaan Aparatur Negara Nomor SE/04/M.PAN/03/2006 tentang Batas Usia Pensiun yang menduduki Jabatan Struktural Eselon I dan Eselon II.<sup>31</sup>

### 3. Syarat Pensiun

Pensiun adalah jaminan hari tua dan sebagai balas jasa terhadap Pegawai Negeri yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada Negara. Pada pokoknya adalah menjadi kewajiban setiap orang untuk berusaha menjamin hari tuanya, dan untuk ini setiap Pegawai Negeri Sipil wajib menjadi peserta dari suatu badan asuransi sosial yang dibentuk oleh pemerintah. Karena pensiun bukan saja sebagai jaminan hari tua, tetapi juga adalah sebagai balas jasa, maka Pemerintah memberikan sumbangannya kepada Pegawai Negeri.

Iuran pensiun Pegawai Negeri dan sumbangan Pemerintah tersebut dipupuk dan dikelola oleh badan asuransi sosial Hak atas pensiun Pegawai (UU No. 11 Tahun 1969, Pasal 9). Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berhak menerima pensiun pegawai, jikalau ia pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai:

- a. Telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 Tahun dan mempunyai masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 20 Tahun.
- b. Mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 4 Tahun dan oleh badan / pejabat yang ditunjuk oleh departemen kesehatan berdasarkan peraturan

---

<sup>31</sup>Jayusman, "Pemberhentian dan Pensiun Pegawai Negeri Sipil" (makalah pada seminar pensiun PNS Kabupaten Buleleng yang diselenggarakan di Kabupaten Buleleng, Buleleng 2016) h.10

tentang pengujian kesehatan pegawai negeri, dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga karena keadaan jasmani atau rohani yang tidak disebabkan oleh dan karena ia menjalankan kewajiban jabatannya.

- c. Pegawai negeri yang setelah menjalankan suatu tugas Negara tidak dipekerjakan kembali sebagai pegawai negeri, berhak menerima pensiun pegawai apabila ia diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri dan pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai negeri ia telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 tahun dan memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang – kurangnya 10 Tahun.<sup>32</sup>

Berikut beberapa persyaratan pensiun PNS:

- 1) Pendaftaran isteri/suami/ anak sebagai yang berhak menerima pensiun janda/duda:
  - a) Pendaftaran isteri (isteri-isteri)/suami/anak(anak-anak) sebagai yang berhak menerima pensiun janda/duda harus dilakukan oleh pegawai negeri;
  - b) Penerima pensiun pegawai yang bersangkutan menurut petunjuk kepala Kantor Urusan Pegawai;
  - c) Pendaftaran lebih dari seorang isteri sebagai yang berhak menerima pensiun harus dilakukan dengan pengetahuan tiap-tiap isteri didaftarkan;

---

<sup>32</sup>Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Berhubungan dengan sifatnya sebagai jaminan hari tua, Pasal 9.

- d) Pendaftaran isteri (isteri–isteri)/anak (anak-anak) sebagai yang berhak menerima pensiun janda harus dilakukan dalam waktu 1 (satu) tahun sesudah perkawinan/kelahiran atau sesudah saat terjadinya kemungkinan lain untuk melakukan pendaftaran itu.

## 2) Persyaratan Pengurusan Pensiun

- a) DPCP
- b) Foto kopi SK pertama di legalisir
- c) Foto kopi SK terakhir Di legalisir
- d) Pas Foto 4 x 6 (5 lembar)
- e) Fotokopi surat nikah dilegalisir
- f) Foto kopi akte kelahiran anak di legalisir
- g) Foto kopi KARPEG
- h) SKP tahun terakhir rata-rata bernilai baik
- i) Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat

## 3) Persyaratan Pengurusan Pensiun Janda/Duda

- a) Surat Pengantar dari instansi bagi yang meninggal dunia/tewas/cacat karena dinas
- b) Foto kopi SK Pensiun
- c) Foto kopi Surat Kematian Di legalisir
- d) Surat Keterangan kejadian
- e) Pas Foto 4 x 6 (5 lembar)
- f) Foto kopi surat nikah dilegalisir
- g) Foto kopi Daftar Susunan Keluarga
- h) SKP tahun terakhir rata-rata bernilai baik

Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat (dengan catatan apabila yang bersangkutan berhak kenaikan pangkat pengabdian).<sup>33</sup>

#### 4. Yang Berhak Menerima Gaji Pensiun

Menurut Pasal 18 UU tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda pegawai disebutkan; apabila pegawai Negeri atau penerima pensiun pegawai meninggal dunia, sedangkan ia tidak mempunyai isteri/suami lagi berhak untuk menerima pensiun janda/duda atau bagian janda termaksud pasal 17 Undang-Undang ini maka:

- a. Pensiun janda diberikan kepada anak/anak-anaknya, apabila hanya terdapat satu golongan anak yang seayah-seibu.
- b. Satu bagian pensiun janda diberikan kepada masing-masing golongan anak yang seayah-seibu.
- c. Pensiun duda diberikan kepada anak (anak-anaknya).

Apabila pegawai Negeri pria atau penerima pensiun pegawai pria meninggal dunia, sedangkan ia mempunyai isteri (isteri-isteri) yang berhak menerima pensiun janda/ bagian pensiun janda di samping anak (anak-anak) dari isteri (isteri-isteri) yang telah meninggal dunia atau telah cerai, maka bagian pensiun janda diberikan kepada masing-masing isteri dan golongan anak (anak-anak) seayah-seibu termaksud. Anak (anak-anak) yang berhak menerima pensiun janda atau bagian pensiun janda menurut ketentuan-

---

<sup>33</sup>Humas ULM, "Persyaratan Pensiun Pns"(On-line), tersedia di: <https://ulm.ac.id/id/2017/07/06/persyaratan-pensiun-pns/> (6 Juli 2017).



ketentuan ayat (1) atau ayat (2) pasal ini, ialah anak (anak-anak) yang pada waktu pegawai atau penerima pensiun pegawai meninggal dunia:

- a. Belum mencapai usia 25 tahun.
- b. Tidak mempunyai penghasilan sendiri.
- c. Belum nikah atau belum pernah nikah.<sup>34</sup>

## 5. Berakhirnya Hak Pensiun

Pemberhentian pegawai terdiri dari 2 jenis yaitu pemberhentian sebagai pegawai negeri sipil dan pemberhentian dari jabatan negeri. Yang dimaksud dengan pemberhentian sebagai pegawai negeri sipil adalah pemberhentian yang menyebabkan yang bersangkutan tidak lagi berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil. Dan juga yang dimaksud dengan pemberhentian dari jabatan negeri adalah pemberhentian yang menyebabkan yang bersangkutan tidak lagi bekerja pada suatu satuan organisasi negara, tetapi masih berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil.

Dalam jenis-jenis pemberhentian sebagai pegawai negeri sipil. Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil terdiri dari:

- a. Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil meliputi :
  - 1) Meninggal Dunia.
  - 2) Atas Permintaan sendiri.

Pada prinsipnya pegawai negeri sipil yang mengajukan

---

<sup>34</sup>Iwan Al Khasni. "Mereka yang Berhak atas Pensiunan PNS" (On-line), tersedia di: <https://jogja.tribunnews.com/2012/12/04/mereka-yang-berhak-atas-pensiunan-pns?page=2> (4 September 2012)

permintaan berhenti, dapat diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil. Permintaan berhenti tersebut dapat ditunda untuk paling lama 1 tahun, apabila kepentingan dinas yang mendesak. Permintaan berhenti dapat ditolak apabila pegawai negeri sipil yang bersangkutan masih terikat dalam keharusan bekerja pada Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau masih ada sesuatu hal yang harus dipertanggungjawabkan.

### 3) Mencapai Batas Usia Pensiun

Batas usia pensiun pegawai negeri sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 adalah 56 tahun, kecuali bagi jabatan - jabatan tertentu.<sup>35</sup>

### 4) Adanya Penyederhanaan Organisasi

Perubahan satuan organisasi negara adakalanya mengakibatkan kelebihan pegawai. Apabila terjadi hal yang sedemikian maka pegawai negeri sipil yang kelebihan itu disalurkan pada satuan organisasi negara lainnya. Kalau penyaluran dimaksud tidak mungkin dilaksanakan, maka pegawai negeri sipil yang kelebihan itu diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atau dari jabatan negeri dengan mendapat hak - hak kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 5) Pemberhentian Karena Tidak Cakap Jasmani Dan Rohani.

Berdasarkan peraturan undang - undangan yang berlaku yang

---

<sup>35</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

dinyatakan dengan surat Keterangan Tim Penguji Kesehatan dinyatakan :

- a) Tidak dapat berkerja lagi dalam semua Jabatan Negeri karena kesehatannya.
- b) Menderita penyakit atau kelainan yan berbahaya bagi diri sendiri atau lingkungan kerjanya.<sup>36</sup>

b. Pegawai Negeri Sipil Dapat Diberhentikan Dengan Tidak Hormat karena:

- 1) Melanggar sumpah / janji pegawai negeri sipil dan sumpah / janji Jabatan. Selain Pelanggaran sumpah/janji pegawai negeri sipil dan sumpah / janji jabatan karena tidak setia kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah,
- 2) Melakukan penyelewengan terhadap Ideologi Negara, Pancasila, Undang - Undang Dasar 1945 atau terlibat dalam kegiatan yang menentang Negara dan Pemerintah; atau
- 3) Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya kurang dari 4 (empat) tahun.<sup>37</sup>

c. Pegawai Negeri Sipil Dapat Diberhentikan Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Atau Tidak Dengan Hormat karena :

- 1) Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak

<sup>36</sup>Pasal 87 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

<sup>37</sup>Pasal 87 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

pidana kejahatan yang ancamannya 4 tahun atau lebih; atau

2) Melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat.<sup>38</sup>

d. Pegawai Negeri Sipil diberhentikan karena meninggalkan tugas:

1) Pegawai negeri sipil yang meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu 2 bulan terus menerus dihentikan pembayaran gajinya mulai bulan ketiga. Apabila dalam waktu kurang dari 6 bulan melaporkan diri kepada pimpinan instansinya, maka ia dapat ditugaskan kembali jika ada alasan - alasan yang dapat diterima atau diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil apabila ketidakhadirannya itu adalah karena kelalaian sendiri, dan menurut pendapat pejabat yang berwenang akan mengganggu suasana kerja jika ia ditugaskan kembali.

2) Pegawai negeri sipil yang meninggalkan tugas secara tidak sah terus menerus selama 6 bulan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil. Pemberhentian tersebut ditetapkan berlaku mulai tanggal penghentian pembayaran gajinya dan gaji selama 2 bulan sejak ia tidak masuk bekerja diberikan kepadanya. Pemberhentian karena meninggal dunia atau hilang.

3) Pegawai negeri sipil yang meninggal dunia dengan sendirinya dianggap diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil. Untuk kelengkapan tata usaha kepegawaian maka pimpinan instansi yang bersangkutan serendah - rendahnya Kepala Sub Bagian atau

---

<sup>38</sup>Pasal 87 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.



pejabat lain yang setingkat dengan itu membuat surat keterangan meninggal dunia.

- 4) Pegawai negeri sipil yang hilang dianggap telah meninggal dunia pada akhir bulan ke-12 sejak ia dinyatakan hilang. Berdasarkan berita acara atau surat keterangan dari pejabat yang berwajib, maka pejabat yang berwenang membuat surat pernyataan hilang. Surat pernyataan hilang dibuat selambat-lambatnya pada akhir bulan kedua sejak yang bersangkutan hilang. Pejabat yang membuat adalah Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Gubernur, Bupati/Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk.

- 5) Pegawai negeri sipil yang telah dinyatakan hilang, yang sebelum melewati masa 12 bulan diketemukan kembali dan masih hidup dan sehat, dipekerjakan kembali sebagai pegawai negeri sipil. Pegawai negeri sipil yang telah dinyatakan hilang yang belum melewati masa 12 bulan diketemukan kembali, tetapi cacat diperlakukan sebagai berikut :

- a) Diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dengan hak pensiun apabila ia telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 4 tahun, tetapi apabila ia belum memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 4 tahun maka ia diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil tanpa hak pensiun.
- b) Apabila hilangnya dan cacatnya itu disebabkan dalam dan oleh

karena ia menjalankan kewajiban jabatannya, maka ia diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun tanpa memandang masa kerja.

c) Pegawai Negeri Sipil yang telah dinyatakan hilang diketemukan kembali setelah melewati masa 12 bulan diperlakukan sebagai berikut:

(1) Apabila ia masih sehat, dipekerjakan kembali;

(2) Apabila tidak dapat bekerja lagi, dalam semua jabatan Negeri berdasarkan surat Keterangan Tim Penguji Kesehatan, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan mendapat hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>39</sup>

e. Pemberhentian Karena Sebab-Sebab Lain :

1) Pegawai Negeri Sipil yang tidak melaporkan diri kepada pimpinan instansi induknya 6 bulan setelah habis menjalankan cuti di luar tanggungan negara, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

2) Pegawai Negeri Sipil yang terlambat melaporkan diri kembali kepada instansi induknya setelah habis menjalankan cuti di luar tanggungan negara diperlakukan sebagai berikut:

a) Apabila keterlambatan melaporkan diri itu kurang dari 6 bulan maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat dipekerjakan

---

<sup>39</sup>Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

kembali apabila alasan-alasan tentang keterlambatan melaporkan diri itu dapat diterima oleh pejabat yang berwenang dan ada lowongan dan setelah ada persetujuan Kepala BKN.

b) Apabila keterlambatan melaporkan diri itu kurang dari 6 bulan tetapi alasan-alasan tentang keterlambatan melaporkan diri itu tidak dapat diterima oleh pejabat yang berwenang maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

c) Apabila keterlambatan melaporkan diri itu lebih dari 6 bulan maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.<sup>40</sup>

f. Pemberhentian Karena Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota/Pengurus Partai Politik

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 menyatakan bahwa Pegawai Negeri dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Pegawai Negeri Sipil yang akan menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik wajib mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang diajukan secara tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan tembusannya disampaikan kepada:

- 1) Atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, serendah-rendahnya pejabat struktural eselon IV.
- 2) Pejabat yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian instansi yang bersangkutan;

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

3) Pejabat yang bertanggung jawab di bidang keuangan yang bersangkutan.<sup>41</sup>

Pegawai Negeri Sipil yang mengundurkan diri tersebut diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Pemberhentiannya terhitung mulai akhir bulan yang bersangkutan mengajukan pengunduran diri. Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik tanpa mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil yang mengundurkan diri yang ditangguhkan pemberhentiannya, tetapi tetap menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik diberhentikan tidak dengan hormat. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut di atas berlaku terhitung mulai akhir bulan yang bersangkutan menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

g. Pemberhentian Sementara

Untuk kepentingan peradilan seorang Pegawai Negeri yang didakwa telah melakukan suatu kejahatan/pelanggaran jabatan dan berhubungan dengan itu oleh pihak yang berwajib dikenakan tahanan sementara, mulai saat penahanannya harus dikenakan pemberhentian sementara. Seorang Pegawai Negeri yang oleh pihak berwajib dikenakan tahanan sementara karena didakwa telah melakukan suatu pelanggaran hukum pidana yang tidak menyangkut pada jabatannya dalam hal

---

<sup>41</sup> Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.



pelanggaran yang dilakukan itu berakibat hilangnya penghargaan dan kepercayaan atas diri pegawai yang bersangkutan atau hilangnya martabat serta wibawa pegawai itu.<sup>42</sup>

Tujuan pemberhentian sementara terutama untuk mengamankan kepentingan peradilan dan juga untuk kepentingan jawatan (instansi).<sup>43</sup> Selama pemberhentian sementara kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberikan penghasilan sebagai berikut:

- 1) Jika ada petunjuk-petunjuk yang cukup meyakinkan bahwa yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran yang didakwakan atas dirinya, mulai bulan berikutnya ia diberhentikan diberikan bagian gaji sebesar 50% dari gaji pokok yang diterimanya terakhir.
- 2) Jika belum terdapat petunjuk-petunjuk yang jelas tentang telah dilakukannya pelanggaran yang didakwakan atas dirinya mulai bulan berikutnya ia diberhentikan diberikan bagian gaji sebesar 75 % dari gaji pokok yang diterimanya terakhir.
- 3) Jika sesudah pemeriksaan oleh pihak yang berwajib pemberhentian sementara ternyata tidak bersalah maka pegawai itu harus segera diangkat dan dipekerjakan kembali pada jabatannya semula, dalam hal yang demikian selama masa diberhentikan untuk sementara ia berhak mendapat gaji penuh serta penghasilan-penghasilan lain yang berhubungan dengan tunjangan istri dan jabatannya. Jika sesudah pemeriksaan pegawai yang bersangkutan ternyata bersalah maka:

---

<sup>42</sup>Pasal 88 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

<sup>43</sup>Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

- a) Terhadap pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara tersebut harus diambil tindakan pemberhentian sedangkan bagian gaji berikut tunjangan-tunjangan yang telah dibayarkan kepadanya tidak dipungut kembali.
  - b) Terhadap pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara tersebut jika perlu diambil tindakan harus diambil tindakan sesuai dengan pertimbangan/keputusan Hakim .
- 4) Jika berdasarkan keputusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus direhabilitasikan terhitung mulai saat diberhentikan sementara dan gaji dibayarkan penuh. Jika ternyata yang bersangkutan dinyatakan bersalah, diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan tidak hormat.<sup>44</sup> Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan pemberhentian sementara adalah :
- a) Pada saat ia mencapai batas usia pensiun diberhentikan pembayaran bagian gajinya.
  - b) Apabila kemudian ia tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan mendapat hak-hak kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhitung sejak akhir bulan dicapainya batas usia pensiun.

---

<sup>44</sup> *Ibid.*

c) Jika ternyata tindak pidana yang dilakukan tersebut diancam hukuman penjara kurang dari 4 tahun dan ada hal-hal yang meringankan maka yang bersangkutan dapat diaktifkan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil, namun tidak tertutup kemungkinan yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin atau tindakan administratif lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

h. Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pemberhentian karyawan

Bagi karyawan yang diberhentikan dengan cara tidak hormat, secara otomatis karyawan tersebut tidak akan mendapat uang pesangon. Bagi karyawan yang diberhentikan dengan hormat oleh perusahaan, maka konsekuensinya adalah perusahaan harus memberikan uang pesangon yang aturannya sesuai dengan yang diberlakukannya undang – undang. Kriteria besarnya uang pesangon bagi karyawan yang diberhentikan antara lain sebagai berikut :

- 1) Masa kerja sampai 1 (satu) tahun, maka diberikan pesangon sebesar 1 bulan upah bruto.
- 2) Masa kerja 1 s/d 2 tahun, diberikan pesangon sebesar 2 bulan upah bruto.
- 3) Masa kerja 2 s/d 3 tahun kerja, diberikan pesangon sebesar 3 bulan upah bruto.
- 4) Masa kerja 4 tahun dan seterusnya, diberikan pesangon sebesar 4

bulan upah bruto.<sup>45</sup>

Sedangkan besarnya uang jasa yang harus diberikan selain uang pesangon adalah sebagai berikut :

- 1) Masa kerja 5 s/d 10 tahun, adalah sebesar 1 bulan upah bruto.
- 2) Masa kerja 10 s/d 15 tahun, adalah sebesar 2 bulan upah bruto.
- 3) Masa kerja 15 s/d 20 tahun, adalah sebesar 3 bulan upah bruto.
- 4) Masa kerja 20 s/d 25 tahun, adalah sebesar 4 bulan upah bruto.
- 5) Masa kerja 25 tahun keatas, adalah sebesar 5 bulan upah bruto.<sup>46</sup>

Namun demikian, besarnya uang pesangon bagi beberapa perusahaan ditetapkan dalam peraturan-peraturan perusahaan tersebut, tetapi tidak boleh kurang dari sebesar-besarnya yang ditetapkan dalam undang-undang.

## **6. Pembatalan dan Hapusnya Pensiun**

- a. Berakhirnya hak pensiun pegawai ( pasal 14 UU No.11/1969 )

Hak pensiun pegawai berakhir pada penghabisan bulan penerima pensiun pegawai yang bersangkutan meninggal dunia.<sup>47</sup>

- b. Pembatalan pemberian pensiun pegawai ( pasal 15 UU No. 11/1969 )

Pembayaran pensiun pegawai dihentikan dan surat keputusan tentang pemberhentian pensiun pegawai dibatalkan, apabila penerima pensiun pegawai diangkat kembali menjadi pegawai negeri atau diangkat kembali dalam suatu jabatan negeri dengan hak untuk kemudian setelah

<sup>45</sup>Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

<sup>46</sup>*Ibid.*

<sup>47</sup>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Berakhirnya hak Pensiun Pegawai, Pasal 14.



diberhentikan lagi, memperoleh pensiun menurut Undang-undang atau peraturan yang sesuai dengan UU. No.11/1969.<sup>48</sup>

### C. Tinjauan Pustaka

Masalah hak dana pensiun PNS sudah dibahas oleh peneliti terdahulu dalam beberapa judul penelitian, antara lain sebagai berikut:

1. Dalam jurnal Hukum Online.com yang berjudul “Ketentuan Pembagian Ahli Waris Bagi Pensiun PNS”, karya dari Sovia Hasanah, S.H. berpendapat bahwa sebagai istri seorang PNS yang meninggal dunia, ia berhak memperoleh pensiun janda. Anak angkatnya baru mendapat hak pensiun apabila tidak ada lagi istri (janda PNS) yang berhak menerima pensiunjanda. Kemudian menurut waris Islam janda PNS tersebut berhak atas warisan, yaitu mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak. Karena anaknya merupakan anak angkat, maka pada dasarnya ia tidak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya. Namun, orangtua angkat dapat memberikan wasiat asalkan tidak melebihi 1/3 harta peninggalannya. Hal ini berbeda dengan yang penulis teliti.<sup>49</sup>
2. Dalam skripsi yang berjudul “ Status Warisan Dana Pensiun PNS Menurut Bahtsul Masa’il NU dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah”, karya Abdul Rohim berpendapat bahwa status warisan dana pensiun PNS menurut Bahtsul Masa’il NU dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah menyebutnya bukan termasuk warisan, karenanya

<sup>48</sup>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pembatalan pemberian pensiun pegawai, Pasal 15.

<sup>49</sup>Sovia Hasanah, S.H., “Ketentuan Pembagian Waris Bagi Ahli Waris PNS”. *Jurnal Hukum Online* (18 Agustus 2017)

menjadi hak istri dan atau anaknya yang telah ditentukan oleh undang-undang. Maka skripsi tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.<sup>50</sup>

3. Dalam skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap ketentuan penerimaan uang pensiun PNS dalam UU No. 11 tahun 1969 tentang pensiun pegawai dan pensiun janda/duda pegawai kaitannya dengan penentuan ahli waris”, karya dari Siti Maslikha berpendapat bahwa ketentuan penerimaan uang pensiun janda/duda yang terdapat dalam UU No. 11 Tahun 1969 tidak sepenuhnya menerapkan hukum kewarisan Islam karena hanya memberikan uang pensiun yang merupakan harta peninggalan seorang PNS kepada golongan ahli waris yang sama sekali tidak bisa ter-*hijab hirman*, yaitu hanya janda/duda, anak dan orangtua. Skripsi tersebut berbeda dengan penelitian yang diteliti oleh penulis.<sup>51</sup>

Dari ketiga judul penelitian di atas tidak terdapat kesamaan dalam membahas permasalahan status hak dana pensiunan PNS . Oleh sebab itu penelitian yang berjudul “ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG HAK DANA PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL” (Studi Kasus di Kampung Majabaru, Kelurahan Durian Payung, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung), perlu untuk diteliti lebih dalam oleh penulis karena sebelumnya belum pernah dibahas oleh peneliti manapun.

---

<sup>50</sup> Abdul Rohim, “Status Warisan Dana Pensiun PNS Menurut Bahtsul Masa’il NU dan Majelis Tarjih & Tajdid Muhammadiyyah”. (Skripsi Program Perbandingan Mahdzab UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015), h. 93

<sup>51</sup> Siti Maslikha, “Analisis Hukum Islam terhadap Ketentuan Penerima Uang Pensiun PNS Dalam UU No. 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai Dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Kaitannya Dengan Penentuan Ahli Waris”. (Skripsi Program Ahwal Al-Syakhsiyyah IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012), h.83.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Aldizar, Addys, Faturraman, *Hukum Waris*, Jakarta: Senayan Abadi Publisbing, 2004.
- Anwar, Ahmad, *Prinsip-Prinsip Metodologi Research*, Yogyakarta: Sumbangsi, 1975.
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineke Cipta, 2013.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali, *Ilmu Hukum Waris Menurut Islam*, Jakarta: Gema Insani press, 1995.
- Dahlan, Zaini, *Hukum Waris Menurut Al-Qur'an dan Hadits*, Bandung: Trigenda Karya, 1995.
- Hanbal, Imam Ahmad bin, *Musnad Imam Ahmad bin Hambal*, Kairo: Muassasah Qurtubah, 1978.
- Hasan, Hasniah, *Hukum Warisan Dalam Islam*, Surabaya: Gramedia Press, 2004.
- Indriy, Gitosudarmo, *Prinsip Dasar Manajemen Kepegawaian*, Yogyakarta: BPFE, 1982.
- J. Supranto, *Metode Riset Aplikasinya dalam pemasaran* Jakarta: PT. Rieneka Cipta, 2003.
- Jakson, Charles, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, Bandar Lampung: Justice Publisher, 2014.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi Ke-empat*, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Kazuri, Ahmad, *Sistem Asabah: Dasar Pemindahan Hak Milik atas Harta Tinggalan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Mubin (Al-Qur'an dan Terjemahnya)*, Jakarta: Pustaka Al-Mubin, 2013.
- Narbuko, Kholid, Abu Achmadi, *Metodologi Peneitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

Mardalis, *Metode Penelitian suatu pendekatan Proposal*, Jakarta: PT Bumi Aksa, 2008.

Marzuki, *Metodologi riset Panduan Penelitian Bidang Bisnis dan Sosial*, Yogyakarta, Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2005.

Moloeng , Lexy J., *Metode Penelitian Kulitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013.

Ramulya, M. Idris, *Perbandingan Kewarisan Islam dengan Kewarisan Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2016.

Sugyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: IKAPI, 2012.

Yahya, Samhuji, *Hukum Waris dalam Syariat Islam Disertai Contoh-Contoh Pembagian Harta Pusaka*, Bandung: CV. Diponegoro, 1992.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang hak penerima pensiun, Pasal 17 dan 18

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Sifat Pensiun, Pasal 3

Undang-Undang No. 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Janda/Duda Pasal 16 ayat (1)

Undang-Undang No. 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Janda/Duda Pasal 18 ayat (1)

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Berhubung dengan sifatnya sebagai jaminan hari tua, pasal 9

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pembatalan pemberian pensiun pegawai pasal 15

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Berakhirnya hak Pensiun Pegawai pasal 14



Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Berhubung dengan sifatnya sebagai jaminan hari tua pasal 9.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

### C. Naskah Ilmiah

Abdul Rohim, "Status Warisan Dana Pensiun PNS Menurut Bahtsul Masa'il NU dan Majelis Tarjih & Tajdid Muhammadiyah". (Skripsi Program Perbandingan Mahdzab UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015), (On-line) tersedia di :[http://digilib.uin-suka.ac.id/20552/1/09360027\\_BAB-I\\_IV-atau-V\\_DAFTAR-PUSTAKA.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/20552/1/09360027_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf) (9 Februari 2020), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Siti Maslikha, "Analisis Hukum Islam terhadap Ketentuan Penerima Uang Pensiun PNS Dalam UU No. 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai Dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Kaitannya Dengan Penentuan Ahli Waris". (Skripsi Program Ahwal Al-Syakhsiyyah IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012), (On-line) tersedia di : <http://digilib.uinsby.ac.id/20764/> (9 Februari 2020), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

### D. Jurnal

Sovia Hasanah, S.H., "Ketentuan Pembagian Waris Bagi Ahli Waris PNS", *Jurnal Hukum Online*, (Jakarta: 18 Agustus 2017), (On-line) tersedia di : <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt598946c68e203/ketentuan-pembagian-waris-bagi-ahli-waris-pns/> (11 Februari 2020), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

### E. Wawancara

Harmiyati, wawancara dengan penulis, Bandar Lampung, 30 Juli 2019

Hi. Salam, wawancara dengan penulis, Bandar Lampung, 30 Juli 2019

Supratman, wawancara dengan penulis, Bandar Lampung, 28 Juli 2019

Sofyan, wawancara dengan penulis, Bandar Lampung, 28 Juli 2019

Suparno, wawancara dengan penulis, Bandar Lampung, 30 Juli 2019

## **F. Website**

Humas ULM. “Persyaratan Pensiun Pns”. (On-line), tersedia di :<https://ulm.ac.id/id/2017/07/06/persyaratan-pensiun-pns/> (6 Juli 2019)

Iwan Al Khasni. “Mereka yang Berhak atas Pensiunan PNS”. (On-line), tersedia di :<https://jogja.tribunnews.com/2012/12/04/mereka-yang-berhak-atas-pensiunan-pns/page-2>. (4 September 2019)

Jayusman. “Pemberhentian Pensiun Pegawai Negeri Sipil”. (On-line), tersedia di :<https://bulelengkab.go.id/assets/instansikab/63/banner/files/pensiun-71.pdf> (6 Juli 2019)

